

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Internasional

Komunikasi internasional sebagai bidang studi kajian adalah sebuah fenomena abad ke-20, meskipun komunikasi internasional telah terjadi sejak manusia mulai berkelompok membentuk komunitas dan saling bertukar ide maupun barang (Mowlana, 1996). Menurut Mowlana (1996, h. 3) pada masa awal pasca Perang Dunia II dan masa *cold war* ilmuwan sosial terkemuka di Amerika mengarahkan kajian komunikasi internasional kepada *future research*, pengajaran, dan mengatur kebijakan komunikasi internasional AS. Berdasarkan situasi tersebut, komunikasi internasional pada saat itu dapat diringkas menjadi empat elemen utama, yaitu:

- a. Konflik internasional, perang, dan penggunaan propaganda.
- b. Pengembangan organisasi internasional dan diplomasi.
- c. *Competing ideology* dan penggunaan komunikasi untuk menyebarkan pesan.
- d. Pengembangan teknologi komunikasi baru.

Ke-empat elemen tersebut yang menjadikan kajian komunikasi internasional meningkat. Bagi beberapa kalangan komunikasi internasional terlihat sebagai isu propaganda, dan bagi beberapa kalangan lainnya komunikasi internasional merupakan dasar pendidikan, kerjasama, dan pemahaman (Mowlana, 1996).

komunikasi internasional menjadi sangat beragam, terutama pada masa teknologi *modern* telah tersebar luas, khususnya pada bidang komunikasi. Beberapa dekade terakhir telah banyak bermunculan artikel dan buku dengan topik “*the age of information*”, “*information society*”, atau “*informatic society*” dan sejenisnya

yang kategorinya sangat berbeda dengan topik terdahulu seperti “*agrarian society*”, “*industrial society*”, dan “*post-indutrial society*” (Mowlana, 1997). Definisi proses komunikasi internasional sendiri sangatlah rumit, sebagaimana pernyataan Hamid Mowlana “*definition of the process of international communication, on the other hand, has been complex and often rather ambiguous, as shown by the state of the field itself*” (Mowlana, 1997, h. 5).

Sedangkan saat ini, digitalisasi dan globalisasi muncul dan menyebabkan pertanyaan mengenai dunia internasional yang kembali meluas dalam bidang komunikasi secara keseluruhan (Braman, Shah, & Fair, 2000). Pada awal abad kedua puluh, selama dan setelah terjadinya Perang Dunia I perdebatan mengenai peran komunikasi dalam propaganda persaingan ekonomi dan militer telah muncul. Sebagaimana dicontohkan dalam karya Walter Lippmann pada 'Opini Publik'-nya tahun 1922 dan Harold Lasswell tentang 'Propaganda Perang' pada tahun 1927 (Thussu, 2000).

As in the general field of international relations, the central task in this area has been to describe, categorize, analyze, and theorize about the process. Meanwhile, these underlying assumptions about international relations in general and international communication in particular have generated an interesting and challenging debate on the role of communication with regard to cultural identity and intercultural communication (Mowlana, 1997, h. 5).

Menurut Mowlana (1997, h. 5) secara partikular komunikasi internasional juga berhubungan dengan peran komunikasinya dalam identitas budaya dan komunikasi interkultural. Kajian komunikasi interkultural sebagai suatu bidang studi dan penelitian telah berkembang sejak beberapa dekade lalu dan hingga sekarang menjadi suatu kajian ilmu yang tidak dapat terpisahkan dari perspektif luas mengenai komunikasi internasional (Mowlana, 1997). Mowlana (1997, h. 6)

menjelaskan bahwa terdapat empat asumsi dasar atau pendekatan yang digunakan dalam komunikasi internasional, yaitu:

- *The idealistic-humanistic approach*

International communication yang membawa bangsa-negara dan masyarakatnya bersama-sama, serta sebagai kekuatan bagi *international organizations* dalam memberikan pelayanannya terhadap *world community*. Meningkatkan pemahaman antara bangsa-negara dan masyarakatnya untuk bekerjasama menjaga perdamaian dunia. Proses komunikasi disini dilihat sebagai bentuk *idealistic*.

- *Political proselytization*

Pendekatan ini melihat *international communication* sebagai propaganda, *ideological confrontation*, iklan, dan *the creation of myth & clichés*. Pendekatan *international communication* ini sangat mendominasi hubungan antara bangsa-negara selama beberapa dekade terakhir.

- *Increasingly visible approach is to view information in the international context as economic power*

Banyaknya proyek-proyek pembangunan internasional seperti, *business ventures*, pemasaran, perdagangan, dan *technology transfer* telah menghasilkan dominasi terhadap negara yang lebih lemah. Selain itu, ‘modernisasi’ yang terjadi di negara berkembang telah mengakibatkan percakapan mereka berubah menjadi ke barat-baratan dan telah membuat mereka lebih setuju untuk dikontrol oleh Barat. Proses ini terkadang disebut sebagai "*westoxification*", berupa dorongan untuk mengkonversi dan

mengadopsi selain perilaku non-pribumi yang dapat menyebabkan lumpuhnya *creative power*.

- *To view information as political power*

Informasi dalam bentuk berita dan data, diperlakukan sebagai komoditi yang netral, atau yang dikenal dengan *value-free commodity*. Studi mengenai *international mass media, the wire services, the production of literature*, dan *cinema and television program* mengungkapkan bahwa di beberapa negara hal tersebut menjadi konsentrasi yang berarti.

Ke-empat pendekatan tersebut telah menunjukkan peningkatan kapasitas *international communication* dalam lima dekade terakhir. Beberapa dari empat pendekatan tersebut dapat saling terkait satu sama lain. Sebagai contoh, kegiatan *student exchange* dapat terkait dengan pendekatan *idealistic humanistic, political proselytization*, atau *economic power aspects of international communication* (Mowlana, 1997, h. 7).

Menurut Mowlana (1997, h. 8) arus informasi diplomatik telah menjadi salah satu bentuk paling tradisional dalam komunikasi internasional. Secara historis, hal tersebut dapat ditelusuri kembali melalui kemunculan negara-negara *modern* dan adanya sistem politik internasional. Gaya diplomasi secara tradisional ditandai pada awal tahun oleh sekelompok kecil elit nasional, dengan menggunakan bentuk *interpersonal communication* (Mowlana, 1997). Tetapi dengan munculnya *modern communication technology* dan munculnya NGOs, maka gaya baru diplomasi yang berorientasi ke arah masyarakat muncul (Mowlana, 1997, h. 8).

Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan pesan mereka kepada penonton secara nasional maupun internasional dengan skala yang besar (Mowlana, 1997). Sebagai contoh, pengembangan radio, televisi, dan satelit yang dapat mewujudkan penyiaran internasional. *national boundaries* tidak lagi menjadi hambatan bagi *international political* dan *diplomatic messages* (Mowlana, 1997, h. 8). Mowlana (1997, h. 8) menjelaskan bahwa hampir semua pemerintah di seluruh dunia membuat lembaga "informasi" dan "propaganda", mempekerjakan *public relations firm*, serta mengorganisir secara teratur dan sistematis "*briefing*" pada suatu pertemuan, dan mengadakan pesta diplomatik yang mewah untuk mempengaruhi *audiens* asing dan domestik (Mowlana, 1997).

Menurut Mowlana (1997, h. 14), *information technologies* dan *information-based products*, serta *services* telah menjadi pusat ekonomi secara keseluruhan. Telekomunikasi merupakan komponen penting ekonomi nasional dan menjadi *way of life* banyak negara. Kecepatan dan efisiensi komunikasi yang pada awalnya ditemukan melalui telegraf, kemudian telepon, sistem transportasi seperti kereta api sangat berperan penting pada abad ke-19 dalam pengembangan kekuatan nasional, regional, dan *imperial powers* (Mowlana, 1997). Pada tahun 1993, hasil studi oleh *Departement of Commerce* mengenai globalisasi media massa mengakui bahwa teknologi informasi *modern* merupakan "*vehicles through which ideas, images, and information are disbursed across the US and throughout the world*" and are *therefore*" (Mowlana, 1997, h. 16).

Saling bertukar informasi mengenai isu-isu yang terkait dalam negara membuat '*free flow information*' dan perkembangan teknologi menjadi sebuah perbincangan utama dalam komunikasi internasional. Berdirinya *new world information and communication order* (NWICO) yang didirikan oleh negara-negara *third world* bertujuan untuk mengurangi dominasi negara barat dalam ranah komunikasi internasional (Ayish, 1992). Sementara itu permasalahan komunikasi di negara-negara *third world* membuat para pendukung posisi Barat (*proponents of western*) menyatakan bahwa hanya *free flow information* yang dapat meningkatkan kinerja sistem media yang di negara-negara nasional maupun internasional (Ayish, 1992). Kemajuan teknologi juga memiliki andil dalam perkembangan komunikasi internasional. Bagaimana pengaruh radio pada saat terjadi Perang Dunia 1 dalam propaganda antar negara dan munculnya '*CNN effect*' yang diperdebatkan sebagai generator teknologi dalam politik dibalik intervensi kemanusiaan lintas batas (Chong, 2007).

Sedangkan menurut Stevenson (1992) studi mengenai komunikasi sendiri telah berkembang untuk mencakup kajian budaya dan media, dan semakin diajarkan dalam kerangka komparatif dan internasional. Namun, komunikasi internasional belum dianggap sebagai disiplin akademis yang terpisah, karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan bidang studi lain (Stevenson, 1992). Komunikasi internasional telah diajarkan di beberapa lembaga, terutama di perguruan tinggi di Amerika Serikat dalam bidang kajian hubungan internasional atau di departemen ilmu politik (Thussu, 2000). Pola komunikasi di tingkat internasional lebih kompleks daripada komunikasi lingkup nasional. Pada tingkat nasional, misalnya, kita bisa berbicara tentang 'komunikasi elit' dimana pesan mengalir kepada dan

diantara orang-orang yang punya pengaruh besar dalam masyarakat (Kuliang & Kuliang, 1971). Sedangkan ditingkat internasional, komunikasi yang dilakukan antar negara-bangsa dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku terkait kelompok tertentu dan termasuk para pengambil keputusan di negara-negara lain (Kuliang & Kuliang, 1971).

Adapun definisi komunikasi internasional secara luas menurut Kuliang (1971) yaitu meliputi tindakan, kata-kata, dan sikap diciptakan oleh individu, swasta, pejabat, atau kelompok baik yang direncanakan (*by design*) atau ketidaksengajaan (*accidental*) dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok tertentu (Kuliang & Kuliang, 1971). Fortner (1993, h. 6) mendefinisikan komunikasi internasional sebagai 'komunikasi yang terjadi di perbatasan internasional'. Pembahasan mengenai komunikasi internasional secara tradisional terkait dengan pertukaran informasi yang dilakukan pemerintah antar pemerintah, dengan beberapa negara kuat yang mendikte tentang agenda komunikasi (Fischer dan Merrill, 1976; Frederick, 1992; Fortner, 1993; Hamelink, 1994; Mattelart, 1994; Maulana, 1996, 1997). Pertukaran informasi tersebut didukung pula dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada akhir abad kedua puluh yang telah meningkatkan lingkup komunikasi internasional, tidak hanya dalam hubungan pemerintah antar pemerintah, melainkan interaksi antar bisnis, antar organisasi, dan antar individu di tingkat global dan kecepatan penyampaian informasi yang tak terbayangkan (Thussu, 2000).

2.2 *Non Government Organizations* (NGOs) dalam Kajian Komunikasi Internasional

Saat ini komunikasi internasional tidak hanya berfokus pada negara atau korporasi transnasional sebagai aktor (Mowlana, 1997). Grup dan perorangan yang berada di lintas batas-batas nasional juga dapat menjadi aktor dalam komunikasi internasional, terlebih lagi sejak banyaknya kegiatan-kegiatan yang melibatkan *transborder human flow* saat Perang Dunia II (Mowlana, 1997, h. xi). *Global expansion* dan kemunculan internet, elektronik sistem untuk pengiriman data, suara, video dan teks telah memungkinkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan lokal dan regional yang baru (Mody, 2003). Secara bersamaan Mody (2003, h. 2) menjelaskan, perluasan infrastruktur teknologi telah memungkinkan organisasi *non government* maupun *non profit*, untuk menjangkau satu sama lain di seluruh perbatasan nasional.

Hamelink (2015, h.2) menjelaskan bahwa, sejak Perang Dunia II, dapat ditemukan beberapa organisasi yang turut menjadi aktor dalam komunikasi internasional, yaitu *Intergovernmental Organizations* (IGOs), *International Government Organizations* (INGOs), *transnational business Corporations* (BINGOs), dan *International Public Service Communication* (PINGOs). Menurut Lewis, D., & Opoku-Mensah, P. (2006) munculnya organisasi non-pemerintah atau *Non Government Organizations* (NGOs) sejak tahun 1980-an aktivitasnya telah banyak didokumentasikan (Edwards dan Hulme, 1992; Hulme dan Edwards, 1997; Lewis, 2005). Kemunculan NGOs merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan internasional, termasuk di dalamnya pembangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, analisis kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya (Lewis & Opoku-Mensah, 2006). Kegiatan NGOs yang bervariasi

dalam skala nasional maupun internasional membuat NGOs memiliki tantangannya sendiri. Sebagai contoh, tantangan yang dihadapi NGOs internasional tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh NGOs di wilayah nasional. Permasalahan NGOs di Afrika akan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh NGOs di Amerika Latin (Lewis & Opoku-Mensah, 2006).

Menurut Gemmill & Bamidele-Izu (2002) NGOs dan kelompok masyarakat sipil atau *civil society* lainnya bukan hanya pemangku kepentingan dalam pemerintahan saja, tetapi juga pendorong kuat di belakang kerjasama internasional melalui mobilisasi aktif dukungan publik untuk perjanjian internasional. Michael Bratton (1994) dalam Gemmill & Bamidele-Izu (2002) menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan interaksi sosial yang dilakukan antara pelaku rumah tangga dan negara yang ditandai dengan kerjasama masyarakat, struktur asosiasi sukarela, dan jaringan komunikasi publik (Bratton, 1994). Istilah masyarakat sipil umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan orang, lembaga, dan organisasi yang memiliki tujuan untuk memajukan atau mengungkapkan tujuan yang sama melalui ide-ide, tindakan, dan tuntutan pada pemerintah (Cohen dan Arato, 1992).

Charnovitz (1997, h. 186) dalam Gemmill & Bamidele-Izu (2002) mendefinisikan NGOs sebagai sekelompok individu yang telah terorganisir melalui banyaknya alasan yang melibatkan imajinasi dan aspirasi. NGOs dapat diatur untuk dapat mengadvokasi permasalahan tertentu, seperti hak asasi manusia, atau untuk melaksanakan program-program bantuan bencana. Selain itu, NGOs dapat memiliki keanggotaan secara lokal maupun global (Charnovitz, 1997, h. 186).

United Nations (UN) adalah organisasi antar pemerintah yang telah ditetapkan untuk berkolaborasi dengan organisasi sektor non-pemerintah (NGOs) (Weiss,

1999). Sejarah menyebutkan bahwa UN bekerja sama dengan NGOs sebagai mitra dalam pelaksanaan program-program tertentu, terutama dibidang tanggap darurat, hak asasi manusia, dan pemantauan pemilu (Gemmill & Bamidele-Izu, 2002).

Sepanjang tahun 1990-an, NGOs secara resmi mengikuti pertemuan UN dalam pembuatan kebijakan internasional. NGOs melakukan akreditasi pada konferensi internasional antar pemerintah di mana mereka dapat melobi delegasi pemerintah, mengadakan *briefing*, dan bahkan secara resmi menangani sesi pleno. Sejumlah delegasi pemerintah pada konferensi internasional sekarang telah diresmikan bahkan termasuk perwakilan NGOs. Pada proses persiapan konferensi UN tahun 1996 tentang *Human Settlements* (Habitat II) misalnya, NGOs dan pemerintah daerah berpartisipasi dalam *informal drafting group* yang bertugas untuk menyusun Deklarasi dan Program yang akan dilakukan. Berada dalam lingkaran pembuat kebijakan *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE), NGOs memiliki suara dalam menetapkan agenda dan aspek lainnya dari proses negosiasi untuk *Aarhus Convention* tahun 1998 pada akses informasi publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan akses dalam *environmental justice* (Gemmill & Bamidele-Izu, 2002).

Menurut Gemmill & Bamidele-Izu (2002) masyarakat internasional telah mengakui bahwa tindakan *global* yang efektif membutuhkan keterlibatan *stakeholder* dalam pembuatan kebijakan internasional dan pelaksanaannya (Wapner, 2000). Keterlibatan NGOs dalam tata kelola lingkungan global dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberikan ide-ide dan menganalisis suatu permasalahan (Charnovitz, 1997). NGOs sering memiliki kemampuan analisis dan teknis yang lebih baik serta kapasitas untuk merespon lebih cepat

daripada pejabat pemerintah terutama dalam hal sebagai berikut (Gemmill & Bamidele-Izu, 2002):

- *Mobilization of public opinion*, NGOs dapat mempengaruhi masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi yang luas.
- *Representation of the voiceless*, NGOs dapat membantu menyuarakan kepentingan orang tidak terwakili dalam pembuatan kebijakan
- *Service provision*, NGOs dapat memberikan keahlian teknis untuk topik tertentu yang diperlukan oleh pejabat pemerintah serta berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan operasional.
- *Monitoring and assessment*, NGOs dapat membantu memperkuat perjanjian internasional dengan memantau upaya negosiasi dan kepatuhan pemerintah.
- *Legitimization of global-scale decision making mechanisms*, NGOs bisa memperluas basis informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas, *authoritativeness*, dan legitimasi pilihan kebijakan dari organisasi-organisasi internasional.

Salah satu peran NGOs yang terpenting adalah berada di tata kelola lingkungan global untuk memberikan informasi *up-to-date* pada isu-isu penting. Pemerintah sering beralih ke NGOs untuk mengisi kesenjangan permasalahan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Sebagai contoh, *World Resources Institute* (WRI) dan *IUCN-The World Conservation Union* yang merupakan contoh penting kolaborasi antara aktor negara dan non-negara, selain itu NGOs biasanya beranggotakan individu dari sejumlah lembaga negara (Gemmill & Bamidele-Izu, 2002). Brunnstrom (2003) mengatakan bahwa masyarakat sipil telah menjadi fokus dalam pembangunan internasional, dan NGOs yang bergerrak di sektor

pembangunan nasional dipandang sebagai kendaraan untuk pengembangan masyarakat sipil yang kuat. Sebagaimana penjelasan Firoze Manji (1999) yang menulis tentang peran NGO di Afrika mengatakan:

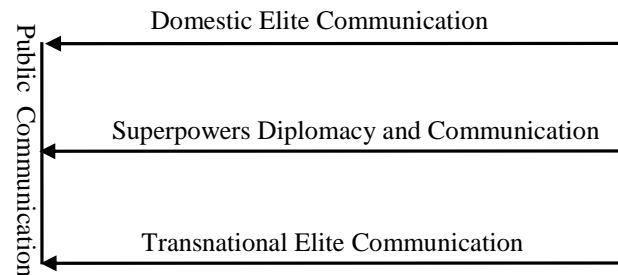
Jika NGO yang memainkan peran positif, maka akan perlu didasarkan pada dua premis: solidaritas dan hak." Dia melanjutkan: Solidaritas bukan tentang berperang melawan orang lain. Ini adalah tentang membangun kerjasama antara konstituen yang berbeda atas dasar saling menghormati diri sendiri dan kekhawatiran tentang ketidakadilan yang diderita oleh setiap orang (Brunnstrom, 2003).

Szporluk (2009) menjelaskan bahwa *International* NGOs memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bergerak secara bebas dari negara, dengan demikian *International* NGOs dapat menghindari beberapa tuntutan akuntabilitas yang biasanya ditempatkan pada organisasi non-pemerintah. Kemampuan untuk bertindak secara global yang dimiliki *International* NGOs juga harus diimbangi dengan berpikir secara lokal tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan menyusun metode yang lebih baik untuk memfasilitasi akuntabilitas demokratis di semua tingkatan dalam organisasi mereka sendiri, terhadap negara dan masyarakat di mana mereka bekerja (Szporluk, 2009).

2.3 Komunikasi Antar Budaya dalam Kajian Komunikasi Internasional

Sebagai contoh, kejadian di Vietnam dan Revolusi Islam di Iran selama tahun 1970-an merupakan dua contoh dramatis konflik politik dan ideologi antara negara adidaya dan negara-negara kecil lainnya (Mowlana, 1997, h. 17). Setelah terjadinya *cold war* kemudian muncul "konflik etnis" yang merupakan kelanjutan tren tahun 1960-an (Mowlana, 1997, h. 17). Berakhirnya *cold war* sangat berkontribusi terhadap tren konflik jangka panjang beberapa negara yang ditandai seperti terjadinya *power transition* (Mowlana, 1997). Menurut Mowlana (1997, h. 18) kehadiran komunikasi internasional dan arus informasi dapat digambarkan sebagai

'*E Phenomenon*' (gambar 2.3). Arus informasi dan komunikasi biasanya terjadi secara horizontal antara tiga struktur yang berbeda dan pada tingkat internasional:



Gambar 2.1 *Inter-Elite communication and the public* (Mowlana, 1997, h. 18)

- (1) *Domestic Elite Communication, socialization, dan policy debate*
- (2) *Great Powers Elite Diplomacy and 'cooperation', 'detente', atau acquiescence*
- (3) *International and transnational elites, socialization, dan activities*

Hingga jatuhnya Uni Soviet, kompetisi dan konflik antara negara *superpowers* mengalami berbagai macam bentuk dan isi. Selain itu, akses menuju saluran komunikasi domestik dan internasional menjadi tujuan utama untuk memajukan persepsi superioritas militer, ekonomi, dan budaya. Singkatnya, komunikasi dalam bentuk *hardware* dan *software* menjadi instrumen dalam globalisasi *cold war* dan sistem "*détente*" (Mowlana, 1997, h. 18). Mowlana (1997, h. 19), menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini tujuh negara terkaya di dunia, AS, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang memiliki kontrol tidak hanya sebagian besar kekayaan dunia, tetapi juga sebagian besar masa depan. Tetapi, beberapa negara kecil yang memiliki kekayaan besar seperti Perancis dan Kanada memiliki kekhawatiran bahwa budaya mereka sendiri akan akan terkikis oleh komersialisme Amerika (Mowlana, 1997).

2.4 Tradisi Fenomenologi

Although phenomenology is an imposing philosophical term, it basically refers to the intentional analysis of everyday life from the standpoint of the person who is living it. Thus, the phenomenological tradition places great emphasis on people's perception and their interpretation of their own experience. For the phenomenologist, an individual's story is more important, and more authoritative, than any research hypothesis or communication axiom (Griffin, 2012, h. 46).

Griffin (2012, h. 45-46) menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan analisis yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pengalaman sehari-hari dari sudut pandang orang yang telah menjalani pengalaman tersebut. Data utama yang dibutuhkan adalah pengalaman sadar seseorang terhadap sesuatu sehingga peneliti dapat mengeksplorasi pemahaman tentang kemungkinan pengalaman yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain (Griffin, 2012). Tradisi fenomenologi sangat memperhatikan pengalaman sadar seseorang. Sebagaimana telah dikatakan Littlejohn & Foss (2009, h. 57) bahwa proses mengetahui sesuatu melalui pengalaman langsung seseorang merupakan wilayah kajian fenomenologi. Istilah fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat (Littlejohn & Foss, 2009). Oleh karena itu, melalui fenomenologi manusia dapat memahami dunia melalui pengalaman langsung.

Terdapat tiga jenis kajian dalam fenomenologi menurut Littlejohn & Foss (2009, h. 58) yaitu, fenomenologi klasik, fenomenologi persepsi, fenomenologi hermeneutik. Pertama, fenomenologi klasik yang dihubungkan dengan Edmund Husserl. Kebenaran menurut Husserl dapat diperoleh melalui pengalaman langsung yang dilakukan saat sadar. Untuk memperoleh kebenaran maka hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi harus dikurung (*bracketing method*) dengan cara menyingkirkan pendapat pribadi, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya dalam melihat segala sesuatu. Pendekatan yang digunakan Husserl dalam fenomenologi

sangat objektif, karena menurut Husserl dunia dapat dipahami tanpa harus membawa kategori pribadi seseorang (Littlejohn & Foss, 2009).

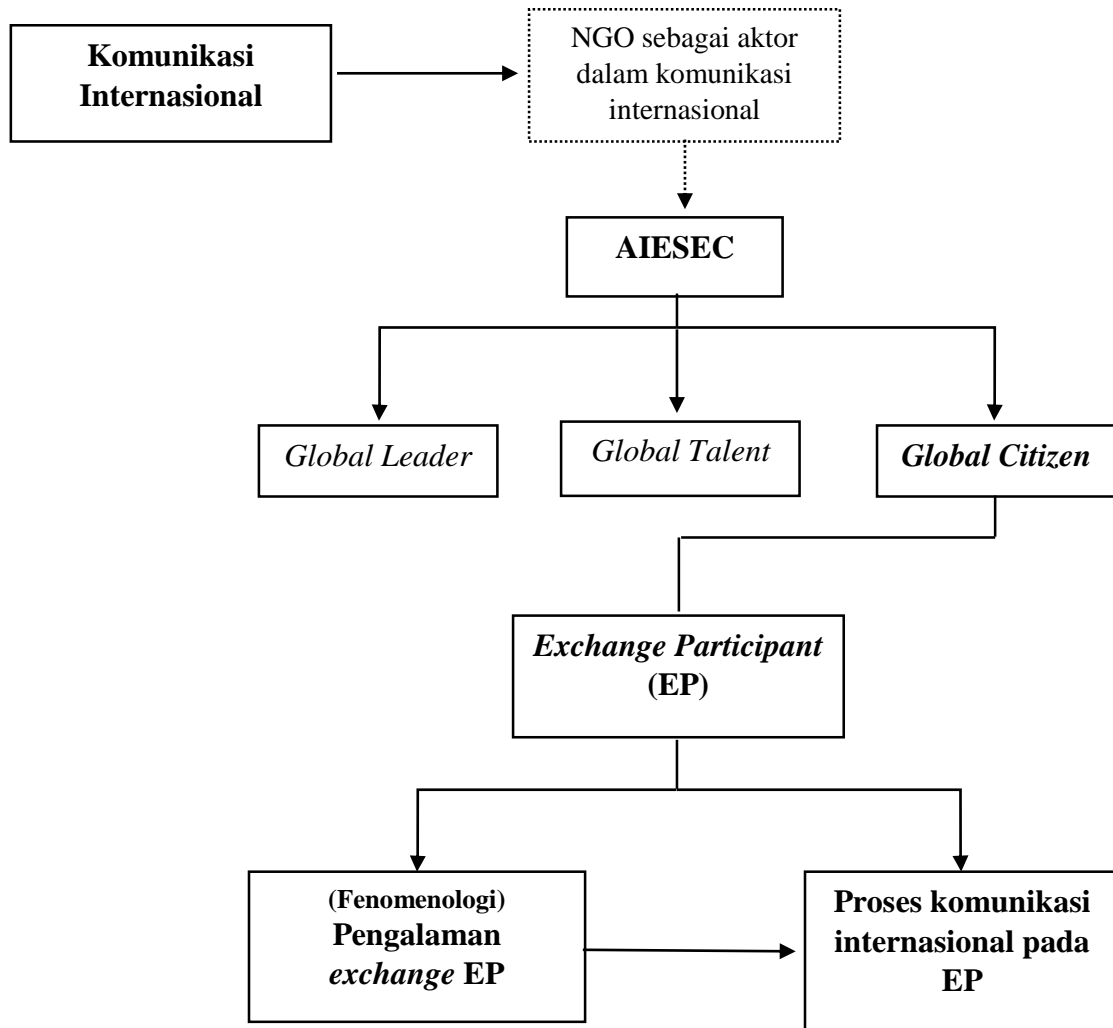
Kedua, fenomenologi persepsi yang sangat berlawanan dari fenomenologi klasik. Pada kajian fenomenologi persepsi manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna dan pengalaman fenomenologis manusia adalah subjektif (Littlejohn & Foss, 2009). Ketiga, fenomenologi hermeneutik yang sangat erat hubungannya dengan Martin Heidegger dalam karyanya *philosophical hermeneutic*. Filosofinya dikenal juga dengan *hermeneutic of dasein*, yang berarti interpretasi mengenai keberadaan. Bagi Heidegger pengalaman alami yang tidak terelakkan adalah hal yang paling penting. Baginya realitas sesuatu tidak hanya diketahui melalui analisis melainkan dengan pengalaman alami yang diciptakan oleh pengguna bahasa dalam kehidupan sehari-hari (Littlejohn & Foss, 2009).

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti mengenai komunikasi internasional. Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai komunikasi internasional melalui beberapa buku dan jurnal peneliti menemukan bahwa penelitian mengenai komunikasi internasional lebih banyak berhubungan dengan arus informasi komunikasi melalui media internasional, politik internasional, hubungan internasional, dan hubungan antar budaya. Begitu luas dan beragamnya pembahasan komunikasi internasional maka peneliti membuat spesifikasi penelitian ini mengenai aktor dalam komunikasi internasional yaitu organisasi internasional non-pemerintah dan perseorangan sebagai peserta yang terlibat dalam kegiatan organisasi internasional non-pemerintah tersebut.

Peneliti memilih AIESEC dikarenakan sejarah awal berdirinya AIESEC berdasarkan keinginan beberapa pemuda yang melihat kekacauan Pasca Perang Dunia II dan ingin menyatukan kembali perdamaian di dunia melalui para pemuda. Selain itu AIESEC sangat mengedepankan kekuatan program ‘*student exchange*’ yaitu melakukan pertukaran pelajar dari satu negara ke negara lainnya untuk mempelajari dan mengenal kebudayaan yang berbeda. Peneliti memilih *exchange participant* dari program *global citizen* dikarenakan EP pada program ini merupakan *volunteer*, pelajar yang tertarik mengikuti kegiatan sosial yang kebanyakan berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi selama enam bulan tanpa di gaji dan peluang untuk melakukan komunikasi dengan EP dan individu-individu yang terlibat dalam proyek tersebut lebih besar. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti mengenai pengalaman EP dalam proyek sosial melakukan proyek sosial merupakan EP yang tertarik pada proyek di bidang pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menggunakan tradisi fenomenologi klasik (Edmund Husserl) untuk menemukan makna dan kebenaran berdasarkan pengalaman sadar para EP saat melakukan kegiatan *global citizen* di negara yang mereka tuju. Peneliti memilih beberapa EP untuk di wawancarai menggunakan *in-depth interview* untuk mengetahui bagaimana pengalaman keseharian EP, dan bagaimana interaksi komunikasi internasional terjadi di dalamnya. Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan hal tersebut maka peneliti membuat bagan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran peneliti